

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada umumnya pembangunan nasional di beberapa negara berkembang termasuk di Indonesia memerlukan perhatian yang lebih diprioritaskan adalah dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut (Mudrajad, 2004:51) adalah proses penciptaan suatu lingkungan oleh masyarakat yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan daerah otonomi baru bukanlah fenomena baru karena kebijakan ini sebenarnya telah berlangsung secara aktif mulai tahun 1950-an. Paska diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyulut keinginan daerah untuk merealisasikan pemekaran wilayahnya, terlebih ketika dikaitkan dengan sejarah represif orde baru yang hanya memfokuskan pertumbuhan beberapa daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi dan pengaturan sumber daya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing daerah **(Pemerintah Republik Indonesia 2004)**.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi baik itu dari badan usaha milik Negara maupun luar negeri **(Feltenstein, 2005)**. Adanya otonomi daerah diharapkan bagi seluruh daerah untuk dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil, dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk membentuk kemandirian atau mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Indonesia **(Kesuma, 2015)**.

Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Pembangunan wilayah merupakan pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan variabel tempat dan waktu. Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Indonesia yang beragam memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik itu kesenjangan antar wilayah,

kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antara golongan pendapatan (**Nindyantoro, 2004**).

Menurut (**Antonescu, 2012**) kesenjangan antar wilayah dan di dalam wilayah terjadi akibat konsentrasi, aglomerasi, tren yang dipicu oleh fenomena eksternal, globalisasi, integrasi, atau fenomena internal, clustering, munculnya kutub pertumbuhan / pengembangan, keterlibatan lembaga lokal dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, dan lain-lain. Terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa disebabkan karena tiap daerah memiliki potensi-potensi unggul yang bisa digali dan dikembangkan yang berbeda-beda, dan setiap daerah memiliki ciri khas mengenai potensi daerahnya.

Kegiatan ekonomi yang bervariasi mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dalam bentuk suatu pola kemitraan, antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor swasta, untuk mengembangkan potensi yang ada dengan cara mendayagunakan seluruh potensi yang ada (**Kusdiana, 2007**).

Suatu daerah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan sektor yang bisa menjadi andalan / unggulan daerah tersebut. Sektor andalan / unggulan ini perlu ditentukan oleh suatu daerah karena setiap daerah mempunyai karakter yang berbeda baik dari sisi kesuburan lahan, letak geogografis, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang ada. Masing-masing daerah memiliki keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda yang ditunjukkan dengan pertumbuhan dan peran sektor-sektor yang bersangkutan. Identifikasi dan klasifikasi sektor diperlukan untuk memberikan gambaran sektor mana yang aktifitasnya menjadi basis perekonomian atau unggulan, potensial, sedang berkembang dan mana pula yang tertinggal, sehingga dapat dilakukan penentuan sektor prioritas.

Pemerintah perlu mengidentifikasi dan menganalisis sektor yang menjadi sektor potensial, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan di daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (**Aryanti, 2009**). Berdasarkan sektor basis, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan strategi pembangunan agar pembangunan sektor perekonomian di daerah dapat berjalan dengan optimal (**Hardyanto, 2014**).

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu

daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008).

Jawa Timur adalah sebuah provinsi dibagian Timur Pulau Jawa. Luas wilayahnya 47.799,75 km<sup>2</sup> dan mempunyai 29 kabupaten termasuk Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. (Anonim, Badan Pusat Statistik, 2016). Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km<sup>2</sup>, di mana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km<sup>2</sup> berupa lahan sawah, sedangkan Kabupaten Magetan terletak di ujung Barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas Kabupaten Magetan mencapai 688,85 Km<sup>2</sup>. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Dalam penelitian ini penulis memilih dua Kabupaten untuk dijadikan penelitian yaitu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan sebagai objek penelitian. Dikarenakan secara geografis letak kabupaten tersebut berdekatan tetapi berbeda tingkat Produk Domestik Regional Brutonya yaitu Kabupaten Ngawi sebesar 11.809.576,96 di tahun 2016; 12.408.451,86 di tahun 2017; 13.061.364,78 di tahun 2018 (dalam Juta Rupiah). Sedangkan di Kabupaten Magetan sebesar 11.398,120,00 di tahun 2016; 11.978,040,00 di tahun 2017; 12.607,120,00 di tahun 2018 (dalam Juta Rupiah) dan mempunyai perbedaan PDRB yang cukup jauh. (Anonim, Badan Pusat Statistik 2019)

Selain itu, kedua Kabupaten ini memiliki persamaan dalam pertanian, memiliki lahan yang luas serta memiliki tanah yang subur, tetapi pertanian yang menonjol di Kabupaten Ngawi yaitu lebih cenderung pada komoditas pokok seperti padi, sedangkan Kabupaten Magetan lebih cenderung ke perkebunan, misalnya sayur-sayuran. Selain itu kedua Kabupaten ini memiliki pariwisata yang sangat meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan dilaksanakan penelitian yang lebih lanjut mengenai **“Analisis Potensi Wilayah Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah ada sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan ?
2. Apakah ada sektor yang mendorong pertumbuhan sektor yang sama diprovinsi di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimanakah Tipologi Klassen di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan tersebut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui adakah sektor yang mendorong pertumbuhan sektor yang sama diprovinsi Di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan

3. Untuk mengetahui Tipologi Klassen di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan tersebut

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan – kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
2. Untuk memberi wawasan dan informasi kepada pembaca tentang apa saja potensi yang ada di Kabupaten tersebut dan sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan maupun sektor tidak unggulan di Kabupaten tersebut.